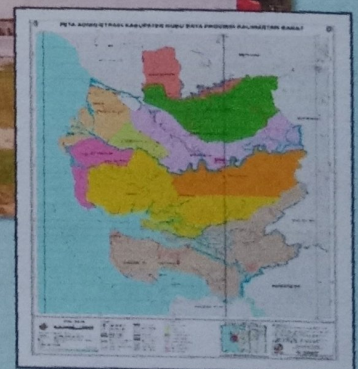


**LAPORAN MANAJEMEN  
RESIKO TAHUN 2025  
KECAMATAN KUALA MANDOR B**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUBU RAYA**

## MANAJEMEN RESIKO

Permasalahan utama ( Strategic Issued ) perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu Strategis. Kecamatan Kuala Mandor B sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ,pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. analisis isu strategis dilakukan melalui proses brainstorming (teknik memecahkan masalah) dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kuala Mandor B, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan.

Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Kuala mandor B adalah sebagai berikut :

1. Adanya peluang inkonsistensi karena perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tertib pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanananaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

2. Belum optimalnya mutu pelayanan publik kecamatan.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyerlenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan munculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

3. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

4. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh- sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Responsibility ( CSR) bagi kepentingan masyarakat disertai perusulan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, peran kecamatan sebagai fasilitator guna terjalin kerjasama perusahaan dengan masyarakat pemohon CSR.

Lampiran permasalahan utama dan rencana tindak lanjut manajemen resiko di Kecamatan Kuala Mandor B sebagai berikut :

NO	SASARAN	KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN PERANGKAT DAERAH		RESIKO	PENYEBAB		DAMPAK	PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terhambatnya Sarpras Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Sarpras	Jaringan internet sering trouble	Dokumen kependudukan tidak selesai tepat waktu	Memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kerusakan jaringan	Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan Dinas terkait
2	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Penyelenggaraan Musdes dan RKPDes tidak sesuai jadwal	SDM	Pengajuan rencana pembangunan Desa tidak sesuai dengan kebutuhan Desa	Banyaknya usulan kegiatan yang tidak tercover	Membuat master plan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan juknis	Menugaskan Kasi Ekbang dan Kasi Tata Pemerintahan untuk melakukan pendampingan serta melaksanakan Bimtek guna meningkatkan kapasitas SDM Perangkat Desa
		2	Monitoring Dan Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa			Tingkat kedisiplinan Perangkat rendah	Perangkat Desa sering terlambat	Membuat SOP Jam Kerja, Peringatan dan Sanksi	

		3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		SDM di Pemerintah Desa yang beragam	kegiatan pelaporan terkait administrasi pemerintah desa hanya terfokus pada perangkat desa yang paham IT	Memberikan bimtek dan pelatihan	
					Potensi konflik Pemerintah desa dan BPD	Kegiatan Pemerintahan desa sering terhambat karena adanya perbedaan pendapat antara Pemdes dan BPD	Memberikan bimbingan teknis terkait tugas dan fungsi pemerintah desa dan BPD	



**Camat Kuala Mandor B**

Muhammad, S. Sos., M.Si  
 Pembina Tingkat I/ IVb  
 NIP 197304062006041006